

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mengetahui tolok ukur implementasi kebijakan ini menggunakan teori George C. Edward III yang memiliki empat indikator demi menentukan keberhasilan implementasi. Maka hasil kesimpulan dari implementasi tersebut sebagai berikut :

1. **Komunikasi**

Komunikasi, dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor melalui indikator komunikasi sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor terhadap pengelola satuan PAUD karena sebagian besar satuan PAUD sudah mengimplementasikan kebijakan PAUD Holistik Integratif di sekolahnya. Namun, indikator komunikasi ini belum berjalan secara maksimal karena sosialisasi yang diselenggarakan belum secara menyeluruh akibatnya masih ada satuan PAUD yang belum menerima sosialisasi sehingga belum menyelenggarakan PAUD HI di satuan PAUD yang dikelola. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk keberhasilan implementasi dalam indikator komunikasi belum maksimal.

2. **Sumber Daya**

Sumber Daya, mengukur keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya menggunakan indikator sumber daya dimana ini menyangkut pada SDM Dinas Pendidikan Kota Bogor khususnya pada Bidang PAUD, fasilitas pendukung, pemenuhan informasi dan pelimpahan kewenangan. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bogor masih kurang yang

menimbulkan persoalan pada kegiatan penyampaian informasi menjadi kurang efektif. Anggaran yang terbatas membuat Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya membantu sedikit dari segi fasilitas kepada satuan PAUD, beruntungnya kewenangan didelegasikan kepada Satuan PAUD dalam penyelenggaraan ini sehingga satuan PAUD tetap bisa menjalankan kebijakan PAUD HI tanpa bergantung pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dari segi pemenuhan fasilitas yang berkualitas di sekolahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk keberhasilan implementasi dalam indikator komunikasi belum maksimal.

3. Disposisi

Disposisi, dalam pemenuhan indikator ini berdasarkan hasil dapat disimpulkan para pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab yang dibuktikan dengan terus memberikan pelayanan yang baik dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh insentif yang diberikan kepada para pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hanya saja pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan stimulus apapun kepada pihak pengelola Satuan PAUD sebagai bentuk motivasi dalam penyelenggaraan kebijakan ini, hal tersebut mengakibatkan sebagian pengelola satuan PAUD enggan mengimplementasikan kebijakan karena tidak adanya motivasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dengan demikian, pada indikator disposisi dapat disimpulkan untuk keberhasilannya masih belum maksimal.

4. Struktural Birokrasi

Struktur birokrasi, melalui indikator ini dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan PUAD HI, para implementor melaksanakan kebijakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan dokumen petunjuk pelaksana. Selain itu untuk pihak pengelola satuan PAUD membuat SOP sendiri yang

disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Dari segi penyebaran tanggung jawab sudah dilakukan, hanya saja keterlibatan stakeholder masih belum maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor, maka dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang, didapatkan suatu saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Bogor seharusnya lebih masif dalam melakukan sosialisasi terhadap Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Sosialisasi hendaknya dilakukan dengan melibatkan seluruh pengelola Satuan PAUD se-Kota Bogor, bukan hanya diberikan kepada pengelola Satuan PAUD tertentu. Kalaupun sosialisasi dilakukan secara bergilir, seharusnya proses sosialisasi terus dijalankan sampai semua pengelola Satuan PAUD menerima undangan sosialisasinya. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor juga harus memanfaatkan media sosial *Website, Instagram, Twitter* dan lain sebagainya dalam melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PAUD HI, karena sejauh ini media sosial yang dimiliki belum ada informasi mengenai kebijakan PAUD HI.
2. Dinas Pendidikan Kota Bogor perlu menambah jumlah pegawai agar pelaksanaan kebijakan PAUD HI dapat berjalan secara efektif. Mengingat minimnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan juga diakibatkan oleh pegawai yang terbatas.
3. Untuk meningkatkan motivasi penyelenggara PAUD dalam mengimplementasikan PAUD HI di lembaganya, sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Bogor memberikan *reward* berupa surplus bagi Satuan PAUD yang telah menyelenggarakan Kebijakan PAUD HI dan memberikan *punishment* bagi Satuan PAUD yang belum mengimplementasikan PAUD HI. Mengingat alasan satuan PAUD

belum melaksanakan kebijakan ini karena kurangnya motivasi yang dimiliki oleh para pengelola satuan PAUD.